

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan

SUASTINI KOSTER MINTA MASYARAKAT
HENTIKAN DISKRIMINASI ODHA

Hal. 5



BUPATI BULELENG:
PARIWISATA BAHARI
BUTUHKAN SINERGI

Hal. 7



HAL. 11

ANTARA BALI ADAKAN PAMERAN FOTO
“RWA BHINEDA 2018”

Suastini Koster Minta Masyarakat Hentikan Diskriminasi ODHA

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster meminta masyarakat setempat untuk berhenti melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) karena mereka berhak hidup normal di masyarakat.

“Pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS bukanlah dengan menjauhi penderitanya, namun dengan menghindari cara-cara penularannya,” kata Putri Koster dalam Peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Provinsi Bali, di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, cara penularan HIV/AIDS yang perlu dihindari diantaranya yakni melakukan seks bebas dan penggunaan jarum suntik secara bergantian.

Istri orang nomor satu di Bali itu berpandangan, edukasi ke tengah masyarakat terkait bahaya virus HIV/AIDS serta cara penularannya perlu terus

dilakukan di tengah-tengah masyarakat. “Di sini peran PKK sangatlah penting, mengingat PKK bisa menyentuh langsung lapisan masyarakat terbawah,” ucapnya.

Putri Koster juga meminta jika ada yang merasa bahwa dirinya berpotensi terkena virus HIV/AIDS, agar segera melakukan pemeriksaan diri ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. “Jangan malu dan takut untuk memeriksakan diri, jika terinfeksi berobatlah dengan teratur,” ucap Suastini Koster.

Pendapat senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mengatakan bahwa stigmatisasi HIV/AIDS sebagai penyakit mematikan telah menyebabkan penderitanya terkena sanksi sosial di tengah masyarakat.

Hal inilah yang disinyalir sebagai penyebab data penderita HIV/AIDS tidak menunjuk-



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster ketika menghadiri Peringatan Hari AIDS Sedunia tingkat Provinsi Bali di Denpasar (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

kan data sesungguhnya. Masih banyak penderita yang belum berobat bahkan yang berpotensi terjangkit tidak memeriksakan diri.

“Tingkatkan edukasi ke tengah masyarakat. Penyakit ini memang berbahaya, namun dapat kita hindari dengan menjauhi cara penularannya bukan penderitanya,” ucapnya.

Dewa Indra juga menyampaikan apresiasi atas perin-

gatan Hari AIDS sedunia yang bertemakan “Saya Berani, Saya Sehat, Ada Obat, Ada Jalan”. “Tema ini mengisyaratkan agar seluruh elemen masyarakat melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),” ujarnya.

Diapun mengapresiasi atas partisipasi dari sejumlah LSM yang menjalankan misi kemanusiaan menanggulangi AIDS khususnya di Bali. (ant)

Gubernur Kaji Rumah Susun Antisipasi Tingginya Permintaan



Penganugrahan Penghargaan Kepada Ketua Kehormatan REI Bali yang diserahkan oleh Gubernur Bali. Antaraneews Bali via Humas Pemprov. Bali

Gubernur Bali I Wayan Koster akan mengkaji opsi pembangunan hunian vertikal atau rumah susun di daerah setempat dalam mengantisipasi kebutuhan rumah yang tinggi atau “backlog”, namun masyarakat Pulau Dewata masih kental dengan aturan adat istiadat.

“Kalau di wilayah peruma-

han dengan hunian vertikal seperti itu pendekatannya RT-RW, tidak lagi berbasis hukum adat, nanti bisa tergerus adatnya, bisa banyak orang lari ke situ supaya tidak kena ikatan dengan adat. Ini perlu dikaji,” katanya saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Real Estat Indonesia (REI) Bali di Nusa Dua, Badung, Senin.

Menurut dia, hunian vertikal memang merupakan opsi yang lebih efisien dalam pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan kondisi harga lahan saat ini yang mahal dan konsep itu laku keras di beberapa daerah di Indonesia.

Namun tidak demikian dengan di Bali yang memerlukan kajian dan pertimbangan mendalam sebelum merealisasikan konsep perumahan vertikal atau rumah susun karena masih erat berkaitan dengan aturan adat dan tidak ingin keduanya saling berbenturan.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu mengatakan pihaknya akan membicarakan dengan REI Bali termasuk membuat perencanaan dan peta jalan untuk mengantisipasi “backlog” di Pulau Dewata yang diperkirakan mencapai

sekitar 200 ribu unit.

“Saya perlu diskusi mendalam terkait penyediaan lahan dan regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mempercepat ini termasuk sumber dana dan pola kepada masyarakat agar bisa dijangkau daya belinya,” ucap mantan anggota DPR RI itu.

Senada dengan Koster, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata berencana akan membuat rancangan yang mencakup usulan dari anggota REI di Bali untuk mempercepat pembangunan perumahan di Bali.

Terkait dengan “backlog”, lanjut dia, sejumlah daerah di Indonesia juga menghadapi hal itu dengan perkiraan kesenjangan rumah yang terwujud dengan kebutuhan masyarakat atau “backlog” mencapai sekitar 11,4 juta. (ant)

Sekda Bali : Jangan Ada Diskriminasi Penyandang Disabilitas



Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menyerahkan bantuan didampingi Kadis Sosial Bali Nyoman Wenten pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018 (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra tidak menginginkan adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan semua pihak diharapkan dapat memberikan pengakuan bagi eksistensi mereka.

“Saya ingin mengetuk nuri seluruh masyarakat agar

lebih memperhatikan para penyandang disabilitas. Perhatian itu hendaknya diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas tanpa memandang perbedaan agama, suku atau partai,” kata Dewa Indra saat menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, para penyandang disabilitas mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Karena itu, mereka berhak memperoleh kesempatan dan hak yang sama baik dalam pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Pemprov Bali, ujar Dewa Indra, berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan memberi penghargaan bagi penyandang disabilitas. Komitmen itu antara lain diwujudkan melalui upaya melengkapi perkantoran dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, dalam rekrutmen CPNS yang saat ini prosesnya masih berjalan, pemerintah juga memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk ikut berkompetisi. “Kita beri mereka kesempatan

yang sama dan saya sangat mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dewa Indra juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi atas terselenggaranya peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2018.

Sementara itu, Kadis Sosial Provinsi Bali Nyoman Wenten mengatakan peringatan HDI adalah wujud pengakuan terhadap eksistensi dan kesetaraan para penyandang disabilitas.

Saat ini, ujar Wenten, pemerintah tengah menggalakkan program inklusi dan ramah disabilitas yang diharapkan memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat. (ant)

Kongres Kebudayaan Bali III Gali Permasalahan Daerah

Kongres Kebudayaan Bali III yang diselenggarakan dari 3-4 Desember 2018 berupaya menggali berbagai permasalahan kebudayaan dari sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata.

“Kongres ini juga terasa istimewa karena Pemerintah Provinsi Bali dengan visi misi gubernur terpilih yang sedang menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2019-2023. Nah, kongres budaya ini memetakan potensi dan kondisi faktual di masing-masing kabupaten/kota, dan terangkum dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota yang hari ini dipaparkan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, di Denpasar, Senin.

Istimewanya pelaksanaan Kongres Kebudayaan Bali saat ini, lanjut dia, sudah memiliki payung hukum yakni UU nomor 5 tahun 2017 ten-

tang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, kongres kali ini dinilai tepat dilakukan jelang Kongres Kebudayaan Indonesia, 7-9 Desember 2018.

“Ini tidak hanya akan disampaikan kepada pusat, tetapi melalui kongres ini kami harapkan akan menjadi pola dasar kebijakan pembangunan kebudayaan di Provinsi Bali 20 tahun ke depan, dan akan menjadi rencana induk pemajuan kebudayaan Bali,” ujarnya.

Dalam Kongres Kebudayaan Bali III, diawali dengan penyusunan pokok-pokok pemikiran kebudayaan masing-masing kabupaten/kota, kemudian dikompilasi menjadi pokok-pokok pemikiran kebudayaan Provinsi Bali.

Dewa Beratha menambahkan, hal itulah yang nantinya akan masuk menjadi kebijakan kebudayaan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2019-2023



Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha saat menyampaikan pemaparan dalam Kongres Kebudayaan Bali III (AntaraneWS Bali/Ni Luh Rhisma)

yang mengadopsi visi misi gubernur terpilih yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bidang kebudayaan. Kemudian, rencana pembangunan kebudayaan ini akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan setiap tahunnya.

“Harapan gubernur adalah Bali menjadi satu kesatuan pengelolaan kebijakan, satu komando. Pembangunan di bidang kebudayaan

pun demikian. Diharapkan menjadi terintegrasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Provinsi Bali, melalui payung hukum yang akan kita buat yaitu pola dasar kebijakan pembangunan kebudayaan Bali,” katanya.

Dalam Kongres Kebudayaan Bali III, setiap kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi faktual di masing-masing wilayah. (ant)

Suastini Koster Minta Perempuan Bali Jangan Lupakan Kodrat



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster dalam serangkaian penilaian pelaksana terbaik kesatuan TP PKK, KKBPK, Kesehatan dan BBGRM tingkat Provinsi Bali, di Desa Kaliakah, Negara, Jembrana, Bali, Selasa (4/12). (Foto Antaranews Bali/Humas Pemprov Bali)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster meminta perempuan, khususnya ibu rumah tangga di Bali, sama sekali tidak dilarang untuk turut serta bekerja dan mencari uang dalam memenuhi kebutuhan hidup, asalkan jangan melupakan kodratnya sebagai perempuan.

“Kodratnya adalah men-

gandung, melahirkan dan merawat serta mendidik anak-anaknya. Jadi, pemenuhan ekonomi yang dilakoni para ibu-ibu, khususnya wanita karier, jangan membuat figurnya tergantikan oleh seorang asisten rumah tangga atau pembantu,” kata Suastini Koster di Negara, Jembrana, Bali, dalam keterangan pers yang diterima,

Rabu.

Ia mengemukakan hal itu dalam sambutan pada serangkaian penilaian pelaksana terbaik kesatuan TP PKK, KKBPK, Kesehatan dan BBGRM tingkat Provinsi Bali, di Desa Kaliakah, Negara, Jembrana, Bali, Selasa (4/12), yang juga dihadiri Bupati Jembrana, I Putu Artha.

Pada penilaian pelaksanaan terbaik kesatuan TP PKK, KKBPK, Kesehatan dan lomba HKG PKK Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh TP PKK Desa Kaliakah juga diserahkan bibit kelapa untuk melengkapi tanaman obat keluarga (toga) pada pemanfaatan “HATINYA” (halaman asri teratur indah dan nyaman) PKK.

“Dengan budi daya tanaman dalam pot yang diletakkan di halaman rumah dan memiliki manfaat terutama

untuk kehidupan sehari-hari keluarga, diharapkan mampu mempermudah anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahkan bermanfaat untuk kesehatan,” katanya.

Untuk mempercepat pencapaian hasil yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, lomba-lomba HKG dan Jambore PKK tingkat Provinsi Bali merupakan kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh TP PKK, BKKBN Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Bali sesuai dengan visi dan misi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” (menjaga kesucian dan keharmonisan Bali beserta isinya). (ant)

Gubernur Koster Ingin Bali Mandiri Pangan

Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan dalam lima tahun ke depan daerah setempat dapat mandiri pangan, meningkatkan nilai tambah petani serta daya saing sektor pertanian.

“Berdasarkan data dan laporan tentang kondisi ketahanan pangan di Provinsi Bali dari aspek ketersediaan pangan cukup memadai untuk kebutuhan penduduk Bali dan wisatawan yang berkunjung. Demikian juga tingkat keterjangkauan dan distribusi pangan sudah sampai ke seluruh pelosok desa di Bali dengan harga sangat stabil,” kata Koster pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tingkat Provinsi Bali, di Singaraja, Buleleng, Jumat.

Meskipun demikian, Koster menyatakan tetap mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga stabilitas cadangan dan harga pangan sehingga Bali

tetap stabil di bidang pangan.

Orang nomor satu di Bali itupun ingin memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam jumlah yang memadai bagi kehidupan warga Bali sebagaimana tertuang dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Terkait peringatan Hari Pangan Sedunia, menurut Koster, bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional serta memotivasi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam membangun ketahanan pangan.

“Untuk itu, kami meminta agar semua pihak tetap berkomitmen dengan se-



Gubernur Bali Wayan Koster pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tingkat Provinsi Bali, di Singaraja, Buleleng (Antaranews Bali via Humas Pemprov Bali)

mangat gotong royong untuk membantu saudara kita yang menemui kesulitan dalam pemenuhan pangan. Salah satu program yang harus kita laksanakan bersama yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang bersumber dari beras atau terigu serta menggantikan dengan sumber-sumber pangan lokal yang ada disekitar kita,” ujar Koster.

Untuk itu, Koster mengajak warga Bali untuk memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan dan lahan kosong atau tidak produktif di sekitar untuk ditanam berbagai jenis tanaman pangan sebagai sumber pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman serta ditanami berbagai jenis tanaman yang sangat diperlukan sebagai sarana upacara/ritual keagamaan. (ant)

Pemkot Denpasar lakukan PIP ke Taman Pintar Yogyakarta



Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya (kanan) menyerahkan cinderamata kepada staf Ahli Bidang Umum Setda Kota Yogyakarta Tri Widayanto. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali melakukan kegiatan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) ke Pemkot Yogyakarta untuk menggali inovasi pengelolaan Taman Pintar dan aplikasi Simbara (Sim barang dan jasa).

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, I Made Toya

di Yogyakarta, Jumat, mengatakan bahwa pelaksanaan PIP tersebut bertujuan untuk menggali kegiatan Pemkot Yogyakarta yang telah menerapkan Taman Pintar dan aplikasi Simbara.

Rombongan Humas dan wartawan Pemkot Denpasar diterima oleh staf Ahli Bidang Umum Setda Kota Yogyakarta

Tri Widayanto didampingi Kabid Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Afia Rosdiana, Kasub Bidang Inventarisasi Aset BPKAD Suharno dan Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Tedi Saparian.

Made Toya lebih lanjut mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Denpasar tentu saja berbanding lurus nantinya dengan fasilitasi sarana dan prasarana.

“Dengan dilaksanakan PIP tersebut dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dapat melahirkan inspirasi bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam berinovasi untuk melaksanakan derap pembangunan yang kreatif, cerdas dan berwawasan budaya yang nantinya dapat membentuk insan kreatif dan berkualitas di Kota Denpasar,” ujarnya.

Ia mengatakan pelaksanaan PIP ini juga merupakan upaya dalam menjalin kerja sama guna menggali potensi sebagai upaya memaksimalkan pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Sementara itu, staf Ahli Bidang Umum Setda Kota Yogyakarta Tri Widayanto menyambut baik kedatangan jajaran Pemkot Denpasar guna mengadakan studi komparasi terkait keberadaan Taman Pintar di Kota Yogyakarta.

Ia mengatakan keberadaan Taman Pintar Kota Yogyakarta telah diresmikan tahun 2008 dan berada dibawah naungan Dinas Pariwisata.

Dikatakan, adapun keberadaan Taman Pintar tersebut bertujuan sebagai pusat pendidikan (science centre), wahana apresiasi dan ekspresi untuk semua usia, terutama untuk pelajar. (ant)

Denpasar Kembangkan Potensi Desa Lewat BUMDes

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kota Denpasar, Bali terus berupaya mengembangkan potensi desa lewat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Denpasar, Bali, Selasa mengatakan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan saat ini dilakukan pendekatan baru sehingga mampu menstimulus dan menggerakkan ekonomi desa.

“Langkah ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni dapat mengembangkan potensi desa melalui pembentukan kelembagaan Bumdes,” katanya.

Alit Wiradana men-

gatakan di Kota Denpasar ada sebanyak 27 desa, dan hingga kini sudah berdiri 21 Bumdes.

Ia berharap seluruh desa di Kota Denpasar tahun ini telah memiliki Bumdes. Saat ini sebagian besar Bumdes yang ada bergerak bidang jasa. Hal ini mengingat keberadaan Bumdes sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing desa.

“Bumdes yang dibangun dapat menggali dan mengembangkan potensi desa disamping juga dapat membuka lapangan kerja,” ucapnya.

Alit Wiradana menambahkan dalam membangun Bumdes sebaiknya melalui kesepakatan musyawarah desa bukan berdasarkan instruksi, sehingga dalam mengembangkan Bumdes



Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Foto Humas Pemkot Denpasar

potensi desa yang ada bisa dapat dikembangkan.

Pendirian Bumdes, menurut Wiradana merupakan salah satu upaya mewadahi pelaku, aset dan kegiatan di bidang ekonomi. Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

“Pendirian Bumdes juga sebagai strategi pengembangan ekonomi desa bersi-

fat kolektif dengan harapan dapat mengembangkan ekonomi desa sehingga menjadi desa mandiri menuju “Denpasar Smart City”.

Setelah terbentuknya 21 Bumdes, lebih lanjut Wiradana mengatakan dengan pembentukan Forum Bumdes. Diharapkan melalui forum ini dapat menjadi wadah untuk saling tukar informasi guna mengembangkan usaha di masing-masing Bumdes. (ant)

Pemkot Denpasar-Himperra Bangun Sinergi Pembangunan Perkotaan



Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima pengurus DPD Himperra Bali terkait menjelang Munas Himperra di Bali. (Antaraneews Bali via Humas Pemkot Denpasar)

Pemerintah Kota Denpasar, Bali membangun sinergi dengan Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Bali dalam meningkatkan pembangunan perkotaan.

“Saya menyambut baik pengurus Himperra yang telah menawarkan kerja sama untuk mengembangkan Kota Denpasar agar lebih maju ke

depannya, khususnya penataan pembangunan lingkungan,” kata Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menerima pengurus DPD Himperra Bali terkait menjelang Munas organisasi tersebut, di Denpasar, Selasa.

Jaya Negara menyambut baik Munas yang akan diselenggarakan oleh Himperra Bali sehingga akan terbentuk

kepengurusan baru dan tatanan organisasi yang lebih baik.

Terkait pembangunan rumah subsidi ataupun program bedah rumah, Jaya Negara menyampaikan dukungannya dan berharap agar rumah yang dibangun tidak hanya sekadar rumah murah melainkan rumah yang memang layak huni.

“Kami berharap pembangunan rumah tersebut tidak berpatokan terhadap harga, tapi memang benar-benar berkualitas dan layak huni serta tentunya memiliki sanitasi yang bagus sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menambahkan walaupun Kota Denpasar memiliki angka kemiskinan terkecil di Bali. Tentunya pihaknya tidak berpuas diri, masih ada beberapa daerah yang memang terlihat kumuh. Karena itu perlu penataan

pembangunan perkotaan agar lebih baik.

Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan pemerintah terhadap pemilik lahan sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat agar menciptakan Kota Denpasar yang bersih, asri dan indah.

“Besarnya harapan sinergi ini dapat terwujud secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan yang berkualitas menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Himperra Bali, Wayan Jayantara menjelaskan organisasi yang baru terbentuk kepengurusannya pada Agustus lalu akan melaksanakan Munas untuk pertama kalinya guna memilih pengurus baru pada 25 Januari 2019. (ant)

ACT-Paradise-Pemkot Denpasar Resmikan UMKM Tangguh Bencana

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PT Indonesian Paradise Property Tbk meluncurkan program Rencana Keberlanjutan Usaha untuk UMKM Tangguh Bencana (business continuity plan for small and medium enterprises) di Sanur, Denpasar, Kamis, yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar.

“Program Rencana Keberlanjutan Usaha untuk UMKM Tangguh Bencana (BCP for SMEs) ini adalah salah satu dari wujud kepedulian kami untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat Bali khususnya UMKM agar semakin tangguh bencana,” kata Presiden Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk, Agoes Soelistyo Santoso.

Sebagai pengembang iconic lifestyle properties di kota-kota besar di Indonesia, lanjut

Agoes, The Paradise Group ingin mewujudkan visi sosial perusahaan, yakni untuk selalu mengembangkan kegiatan sosial yang berkelanjutan kepada para stakeholders perusahaan.

Menurut Agoes, pelaksanaan program BCP for SMEs merupakan bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat UMKM dalam menghadapi potensi bencana, seperti banjir, kebakaran, gunung meletus hingga gempa dan tsunami.

“Bagi UMKM yang menjadi peserta, program ini akan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi potensi bencana dimasa mendatang yang dapat membuat usaha mereka mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan,” katanya.

Melalui program ini, peserta UMKM akan mendapat



Kadis Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena (kiri), Presiden Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk, Agoes Soelistyo Santoso (tengah) dan Vice President ACT, Ibnu Khajar dalam acara peresmian rencana keberlanjutan usaha untuk UMKM tangguh bencana di Sanur, Denpasar, Kamis. (Antaraneews Bali/I Made Surya)

pengetahuan dan juga keterampilan dasar yang akan sangat bermanfaat bagi UMKM dalam membangun ketangguhan usaha.

Sementara itu, Vice President ACT, Ibnu Khajar menambahkan, pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana ini disampaikan langsung oleh tim Instruktur dan Fasilitator dari Disaster Management

Institute of Indonesia (DMII) ACT.

“Program ini melibatkan 100 UMKM peserta yang mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan. Masing-masing peserta akan mendapatkan tiga sesi pelatihan dan pendampingan yang akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan usaha mereka,” katanya. (ant)

Suastini Koster: Program PKK Jangan Sebatas Slogan



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster dalam kegiatan Penilaian Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK Tahun 2018, di Desa Dalung, Kuta Utara, Badung (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengingatkan para kadernya bahwa 10 program pokok PKK jangan hanya dijadikan sebatas slogan, tetapi hendaknya benar-benar dilaksanakan hingga tingkat terbawah.

"10 program pokok PKK ini akan lebih bermakna apabila diikuti dengan kesadaran dan bukan sebatas sebuah

slogan. Program tersebut memiliki arti penting dan sangat strategis guna mewujudkan tujuan gerakan PKK," kata Suastini Koster dalam kegiatan Penilaian Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK Tahun 2018, di Desa Dalung, Kuta Utara, Badung, Rabu.

Tujuan gerakan PKK sendiri yakni memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kes-

ejaheraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, serta hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

"Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya upaya dan kerja sama yang baik dari seluruh pengurus PKK dan seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah," ujar istri orang nomor satu di Bali itu.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung Seniasih Giri Prasta itu, Suastini Koster juga menyatakan bahwa Gerakan PKK dilaksanakan untuk

membantu program pemerintah dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.

Untuk itu, tiap tahun dilaksanakan berbagai program kerja serta lomba yang dikondisikan dengan keadaan dan lingkungan setempat. "Ini juga sangat sesuai dengan program pemerintah saat ini Nangun Sat Kertih Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Adi Arnawa mengatakan PKK menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan suatu pembelajaran kepada masyarakat.

Selain itu, PKK juga merupakan garda terdepan dalam mencetak generasi milenial yang berbobot, karena peranan ibu adalah yang utama. (ant)

Badung Pelajari Budaya Perikanan Air Tawar Purwakarta

Rombongan Pekan Infor-masi Pembangunan (PIP) Badung 2018 yang dipimpin Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, mempelajari budaya perikanan air tawar di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

"Badung sebagai daerah tujuan wisata memiliki kebutuhan ikan termasuk ikan air tawar yang besar. Pertimbangan itu yang mendasari PIP ini menyoar budidaya ikan air tawar yang dipastikan akan mengangkat ekonomi masyarakat," ujar Wabup Suiasa, di Purwakarta, Rabu.

Ia mengatakan, Kabupaten Badung memiliki potensi untuk budidaya ikan air tawar baik dari sisi lahan, sumber daya manusia (SDM), maupun peluang pasarnya.

"Dari hasil pengamatan lapangan ini, analisa kasar kami wilayah Petang dan Sangeh cocok untuk digunakan sebagai

wilayah pengembangan budidaya ikan air tawar," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan PIP Badung mengunjungi Pendopo Kabupaten Purwakarta yang langsung diterima oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, sebelum melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daerah Desa Nagrog Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Wabup Suiasa mengatakan, pihaknya mengungkapkan terima kasih kepada Bupati Anne Ratna Mustika dan jajaran Pemkab Purwakarta karena telah menyempatkan diri menerima rombongan PIP Badung 2018.

"Selain melakukan silaturahmi, kedatangan rombongan kami ini untuk menjabarkan misi dan visi Bupati Badung terutama untuk menjamin ketahanan pangan. PIP Badung 2018 sebelumnya menggali



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (keempat dari kiri) meninjau budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/12). AntaraneWS Bali/Fikri Yusuf

pembibitan padi dengan teknik nuklir. Sekarang kami mempelajari budidaya ikan air tawar," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Anne Ratna mengatakan pihaknya merasa terhormat bisa menerima kunjungan PIP Badung 2018. Ia menjelaskan, sesungguhnya Badung juga menjadi contoh dan objek kunjungan Pemkab Purwakarta untuk mempelajari sisi pendapatan

daerah.

"Terkait dengan tujuan PIP Badung 2018 yang menyoar budi daya ikan air tawar, di wilayah kami budidaya ikan air tawar berkembang dengan baik karena memiliki wilayah penopang air tawar. Salah satunya Waduk Jati Luhur dengan produksi 91.000 ton per tahun dan Waduk Cirata juga berproduksi cukup besar," ujarnya. (adv)

Badung Raih Penghargaan LHKPN 2018 dari KPK



Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan (kiri) menyerahkan penghargaan LHKPN 2018 kepada Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, di ruang Bidara Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/12). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meraih penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 2018 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Humas Pemkab Badung dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Rabu, menyebutkan penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Ketua

KPK Basariah Panjaitan yang diterima langsung oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat penutupan Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia 2018 di ruang Bidara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan (5/12).

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan LHKPN itu sudah menjadi komitmen jajarannya di Pemkab

Badung untuk menjalankan aturan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Sekarang bagaimana kami mengimplementasikan serta menjaga dan mentaati aturan yang ada, tentu secara transparan dan bertanggung jawab dengan terus meningkatkan etos kerja yang baik dan menjauhi tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Badung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada itu juga harus bisa dipertahankan dan kedepannya tentu bisa lebih baik lagi untuk membangun Badung yang kuat dan berkarakter di tahun-tahun mendatang.

“Penghargaan ini sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan dalam pencegahan korupsi

terkait komitmen kami yang tinggi, akurat dan akuntabel guna membangun Badung yang kuat dan sejahtera dengan tepat sasaran dan jauh dari korupsi,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung, Luh Putu Suryaniti mengatakan, dengan diraihnya penghargaan LHKPN 2018 dari KPK di Hari Peringatan Anti Korupsi se-Dunia itu merupakan wujud komitmen Bupati dan Wakil Bupati Badung beserta semua Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan seluruh karyawan/karyawati Pemkab. Badung untuk selalu bekerja dan bekerja lebih baik.

“Mari jaga dan pertahankan penghargaan yang dipercayakan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Badung ini, semoga di tahun kedepan dapat menjadi lebih baik lagi,” katanya. (ant)

Ratusan Warga Gianyar Ikuti Kirab Kalpataru di Desa Taro

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, diikuti Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Sekdakab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya serta sejumlah pejabat bersama ratusan warga Desa Taro, Kecamatan Tegallalang melakukan kirab Kalpataru dengan berjalan kaki dari Kantor Desa Taro menuju Yayasan Lembu Putih, Desa Taro, Selasa (4/12).

Kirab diiringi gambelan baleganjur serta sejumlah penari menambah semarak suasana kirab, wargapun tampak antusias mengikuti kirab sepanjang kurang lebih 1 kilometer tersebut. Sesampainya di Yayasan Lembu Putih, Bupati Mahayastra juga meresmikan monument Kalpataru.

Seperti diketahui, Kabupaten Gianyar melalui Yayasan Lembu Putih, Desa Taro sebagai yayasan konservasi alam berhasil meraih Tropy Kalpataru katago-

ri penyelamat lingkungan. Dari 513 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota penerima Kalpataru seluruh Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Ekonomi, Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bahar pada puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Wisata Alam Batu Putih, Tangkoko Bitung, Sulawesi Utara.

Pj Perbekel Desa Taro, I Nyoman Karang mengatakan, sejarah berdirinya yayasan berawal dari kesadaran para pemuda dalam pelestarian lingkungan sehingga membentuk kelompok Go Green pada Januari 2010. Dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan di kawasan Lambu Putih, Taro hingga terbentuk Yayasan Lembu Putih pada 2012.

Berbekal dari itu, Yayasan



Bupati Gianyar, I Made Mahayastra diikuti Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Sekdakab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya serta sejumlah pejabat bersama ratusan warga Desa Taro, Kecamatan Tegallalang melakukan kirab Kalpataru dengan berjalan kaki dari Kantor Desa Taro menuju Yayasan Lembu Putih, Desa Taro. *Foto Humas Gianyar*

Lembu Putih menyusun rencana kegiatan dalam upaya memaksimalkan pencapaian target kegiatan. Yakni meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian Lembu Putih, memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya perlindungan dan konservasi hutan Taro serta perlindungan situs sejarah Pura Gunung Raung,

pengembangan tanaman langka usada (herbal) dan tanaman upakara.

“Tahun 2015 untuk pertamakalinya Yayasan Lembu Putih diusulkan pada ajang penghargaan Kalpataru. Tahun 2017 diusulkan kembali serta berhasil meraih Tropy Kalpataru kategori penyelamat lingkungan,” tambah Nyoman Karang. (ant)

Bupati Bangli Buka Pelatihan Jurnalis Desa



Bupati Made Gianyar (tengah) membuka pelatihan jurnalistik bagi jurnalis desa se-Kabupaten Bangli (Dok Humas Bangli)

Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan di era globalisasi seperti sekarang, informasi dan teknologi bukan lagi menjadi kebutuhan, tetapi keharusan.

“Kalau bisa menguasai informasi dan teknologi, kemajuan pasti bisa dicapai. Namun sebaliknya, jika kita tidak menguasai informasi dan teknologi, maka bisa dipastikan, kita akan semakin

tertinggal,” kata Bupati Made Gianyar saat membuka pelatihan jurnalistik bagi jurnalis desa se-Kabupaten Bangli, di ruang pertemuan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Senin.

Lebih lanjut Bupati Made Gianyar menekankan, untuk bisa mendatangkan investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Bangli, selain infra-

struktur yang baik, yang tidak kalah penting adalah adanya informasi yang baik, tentang potensi desa di Bangli. menurutnya, jika informasi tentang desa bisa disajikan dengan baik dan kondisinya memang benar-benar baik, potensinya bagus, jalannya bagus, keamanannya bagus, tentu investor tidak akan ragu menginvestasikan dananya di Bangli.

“Saat ini Bangli sudah sangat luar biasa, jalan-jalannya sudah bagus, desa-desa wisatanya sudah bagus, tinggal bagaimana bisa dibangun informasi yang positif agar semakin banyak investor atau wisatawan yang datang ke Bangli”ucapnya.

Terkait dengan pelaksanaan pelatihan jurnalistik bagi jurnalis desa, ia mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Di zaman modern ini keberadaan media sangatlah vital. Dengan ke-

majuan teknologi dan digitalisasi, berita-berita sangat cepat tersebar, baik berita yang positif maupun negatif termasuk berita bohong (hoaks).

Melalui pelatihan jurnalistik ini, Bupati berharap setelah memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik serta teknik penulisan berita, peserta bisa mengelola informasi di desa dengan baik, untuk membangun citra positif bagi pemerintahan desa, serta mampu memilah dan meluruskan berita hoax atau berita tidak benar.

“Saya sangat mengapresiasi pelatihan jurnalistik ini. Melalui pelatihan ini, saya ingin informasi yang baik di desa bisa diketahui seluruh dunia. Dan yang tidak kalah penting, semua informasi yang ada di desa bisa dikelola dengan baik untuk kemajuan desa”harapnya. (ant)

Bupati Klungkung Hadir Pertemuan Aliansi Kota Asia Pasifik

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri pertemuan Aliansi Kota Asia Pasifik ke-3 di Singapura, yang membahas soal pengendalian tembakau dan penyakit tidak menular.

Dalam siaran pers yang diterima dari Humas Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, Jumat, dikatakan, dalam pertemuan itu Suwirta menyampaikan testimoni terkait kawasan tanpa rokok di kabupatennya.

Ia mengatakan, pemerintahannya sangat berkomitmen untuk melakukan pengendalian terhadap produk tembakau dengan cara membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Langkah lainnya, katanya, adalah komitmen penertiban iklan rokok di Kabupaten Klungkung, melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame.

“Komitmen kami untuk melakukan pengendalian terhadap produk tembakau sudah ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi, implementasi, pengawasan dan penegakan peraturan yang berlaku sebagai langkah nyata yang harus dilakukan secara berkesinambungan,” katanya.

Bupati asal Nusa Ceningan ini juga mengatakan, pengendalian produk tembakau tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi dukungan dan komitmen masyarakat juga



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menyampaikan testimoni dalam pertemuan Aliansi Kota Asia Pasifik ke 3 di Singapura, yang membahas soal pengendalian tembakau dan penyakit tidak menular. (Antaraneews Bali/Humas Klungkung)

sangat dibutuhkan.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memasukkan kedalam Perarem (aturan adat) disetiap desa pakraman atau desa adat di Klungkung. “Ini sudah dilakukan di beberapa desa pakraman di Klungkung,” katanya.

Dengan penerapan peraturan daerah dan peraturan

bupati, menurutnya, tingkat kepatuhan pada setiap kawasan meningkat, mencapai 50 persen bahkan lebih.

Salah satunya dilingkungan perkantoran mencapai angka 75 persen, disamping tingkat kepatuhan di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas bermain anak yang sudah mencapai angka 100 persen. (ant)

Bupati Buleleng: Pariwisata Bahari Butuhkan Sinergi

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai pengembangan pariwisata bahari, seperti Buleleng Bali Dive Festival (BBDF), membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat nelayan hingga pecinta lingkungan.

“Pariwisata bahari di Buleleng saat ini sedang bergeliat dan berkembang. Perkembangan ini tentunya akan terus didukung dengan berbagai upaya. Semua pihak harus bersinergi untuk pengembangan pariwisata di Buleleng lebih lanjut,” katanya dalam keterangan pers yang diterima di Singaraja, Buleleng, Bali, Minggu.

Tahun ini, BBDF diselenggarakan di wilayah Bondalem, Tejakula, dengan tajuk “Aksi Seni Tejakula (ASET) BBDF” yang berakhir pada 1 Desember 2018.

“Untuk dapat bersaing dalam kerasnya persaingan dunia pariwisata, memerlukan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak untuk tetap eksis,

karena itu seluruh komponen pariwisata harus tetap mendukung pembangunan pariwisata,” katanya.

Suradnyana menjelaskan, komponen-komponen pariwisata tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling membutuhkan, sehingga kalau mau terus bertahan pada sektor pariwisata, ego sektoral harus dikesampingkan dan komponen pariwisata harus merapatkan barisan, bekerja sesuai dengan peran masing-masing.

“Melalui ajang ASET BBDF tahun 2018 diharapkan adanya atraksi pariwisata yang berkualitas tersebar di seluruh daerah pengembangan pariwisata Buleleng. ASET BBDF juga sebagai momen kebangkitan bersama di dalam menggarungi persaingan global dan tercapainya lagi masa keemasan sektor pariwisata di daerah Buleleng,” katanya.

Dengan ini pula, kesenjangan sektor pariwisata antara



Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat mengikuti Buleleng Bali Dive Festival (BBDF) di wilayah Bondalem, Tejakula, dengan tajuk “Aksi Seni Tejakula (ASET) BBDF” (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Bali selatan dan Bali utara sedikit demi sedikit bisa teratasi.

Menurut Suradnyana, Desa Bondalem memiliki potensi wisata terumbu karang yang sangat baik. Bupati Suradnyana mengungkapkan, Pemkab Buleleng telah melakukan upaya-upaya pengembangan wisata bawah laut yang terintegrasi dengan masyarakat sekitar.

“Dengan terjalannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang sadar lingkungan, Buleleng telah meraih berbagai penghargaan baik itu

penghargaan nasional hingga penghargaan internasional. Hal ini tentunya telah mendorong industri pariwisata di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.

Suradnyana juga menjelaskan pengembangan pariwisata di Buleleng khususnya di Desa Bondalem tidak akan berhasil tanpa campur tangan masyarakat. Ia pun mengaku bangga terhadap masyarakat Desa Bondalem yang mau ikut andil dalam pelestarian dan pengembangan potensi pariwisata di Desa Bondalem. (ant)

Ratusan Penyandang Disabilitas Jembrana Dapat Bantuan



Bupati Jembrana I Putu Artha mengunjungi dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, Kamis (6/12). (Antaranews Bali/Gembong Ismadi)

Ratusan penyandang disabilitas Kabupaten Jembrana, Bali mendapatkan bantuan sembilan kebutuhan pokok dan uang tunai dari pemerintah daerah setempat serangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial dan

Hari Kesehatan.

“Saya perintahkan instansi terkait untuk aktif mendata penyandang disabilitas di Jembrana. Tidak hanya dinas di kabupaten, tapi juga aparat di desa dan dusun,” kata Bupati Jembrana I

Putu Artha, saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada sejumlah penyandang disabilitas, di Negara, Kamis.

Ia mengatakan saat menemuken penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan, Dinas Sosial harus sigap turun ke bawah, demikian juga Dinas Kesehatan harus rutin memantau kondisi kesehatan penyandang disabilitas.

Menurut dia, dengan data yang terus diperbaharui setiap tahun, pemerintah akan lebih gampang dan merata dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Ia menegaskan pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap para penyandang

disabilitas, baik dari sisi bantuan sosial maupun kesehatannya.

“Dengan perhatian dari keluarga dan pemerintah, kami berharap penyandang disabilitas juga optimis dengan terus menjalankan aktivitasnya,” katanya.

Untuk menyerahkan bantuan secara simbolis ini, ia bersama Kepala Dinas Sosial I Wayan Gorim mendatangi empat penyandang disabilitas masing-masing di Kelurahan Dauharu, Desa Budeng, Baluk dan Kaliakah.

Gorim mengatakan sebanyak 198 penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sembilan kebutuhan pokok dan uang tunai Rp2 juta yang diberikan setiap tahun. (ant)

ANTARA Bali Adakan Pameran Foto “Rwa Bhineda 18” Rayakan HUT ke-81

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Bali mengadakan pameran foto bertajuk “Rwa Bhineda Bali 2018” dalam rangkaian “simakrama” (open house) untuk merayakan 81 tahun eksistensi kantor berita Indonesia itu pada 13-16 Desember 2018.

“Pameran foto yang berlangsung di kantor kami di Jalan Mataram 1, Lapangan Lumintang, Denpasar itu akan dibuka Ibu Gubernur Ni Luh Putu Putri Suastini Koster pada pukul 10.00 Wita,” kata Ketua Panitia Pelaksana HUT Ke-81 Tahun LKBN Antara Biro Bali, Nyoman Budhiana, di Denpasar, Jumat.

Simakrama dan pameran foto yang dibuka bertepatan dengan tanggal saat ANTARA dideklarasikan oleh Adam Malik dkk (13-12-1937) itu merupakan acara puncak HUT Antara di Biro Bali yang sebelumnya didahului dengan Seminar Ekonomi bersama Kadin Bali (10/8), Pembekalan Jurnalistik/Fotografi-Hoax bersama BUMN (12/8), Roadshow Jur-

nalistik/Fotografi-Kantor Berita di SMAN 1 Denpasar (18/9), Tradisi Purnabakti Senior IK Sutika (6/10), dan Bakti Sosial (Desember).

“Simakrama dan pameran foto itu akan dihadiri Kabiro Humas Pemprov Bali, Kabag Humas Pemkab/Pemkot se-Bali, Kepala Dinas Kominfo se-Bali, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, pimpinan redaksi media massa, humas BUMN dan swasta, humas universitas dan aktivis pers kampus atau pers sekolah,” kata fotografer senior LKBN Antara Bali itu.

Dalam pameran itu, pihaknya akan memamerkan 30 foto tunggal dan satu foto cerita yang menceritakan sejumlah fakta yang menonjol selama setahun di Provinsi Bali dengan mengambil tema “Rwa Bhineda Bali 2018”. Foto-foto itu merupakan hasil bidikan tiga fotografer LKBN Antara Biro Bali yakni dirinya (I Nyoman Budhiana), I Gede Wira Suryantala, dan Naufal Fikri Yusuf.



“Rwa Bhineda adalah menggambarkan fakta yang kontradiktif atau dua hal yang berbeda sifat, seperti hitam-putih, siang-malam, laki-perempuan, gembira-sedih, dan seterusnya. Fakta dalam dua bingkai itulah yang kami sajikan kepada publik untuk bahan refleksi. Selain Bali, pameran foto HUT ke-81 ANTARA juga dilaksanakan di Biro Jatim (Retrospeksi) dan Biro Jabar (Arke),” katanya.

Khusus foto cerita yang merupakan satu-satunya foto cerita dalam pameran foto yang kedua kalinya di LKBN ANTARA Biro Bali itu menyajikan aktivitas masyarakat “Kampung Bali” Nanshan di Tiongkok.

“Foto itu merupakan hasil bidikan kami saat mengikuti ‘media visit’ ke Tiongkok pada 2-11 Mei 2018 dan bertemu orang-orang Bali di sana,” katanya.

“Dalam simakrama dan pameran foto yang didukung kalangan BUMN, pemerintahan, swasta, dan mitra lain itu, Ibu Gubernur Ni Luh Putu Putri Suastini Koster juga akan menyerahkan ‘Anugerah Tjatronata 2018’ kepada para mitra dan senior Antara serta meluncurkan Katalog Antara Bali yang berisi ‘Sekilas Antara’ dan sebagian foto yang dipamerkan pada 13-16 Desember sejak pukul 10.00 hingga 15.00 Wita,” katanya. (ant)

BPJS Ketenagakerjaan Bali Ajak Perusahaan Tingkatkan Keselamatan Kerja



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi (kanan) saat pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum. (Foto Antara Bali/BPJSTKBanuspa/DewaWiguna)

BPJS Ketenagakerjaan mengajak perusahaan di Bali meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi pekerja ketika mereka melak-

sanakan tugas.

“Kami berharap budaya K3 itu terus ditingkatkan sehingga kinerja usaha juga semakin bagus,” kata Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jami-

nan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Sang Made Sumadi di Denpasar, Jumat.

Untuk mendorong K3 umum tersebut, pihaknya mengadakan pelatihan kepada 100 orang perwakilan dari 100 perusahaan di Bali sebagai langkah awal program sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan tersebut memiliki klasifikasi tertib administrasi, tertib iuran dan yang memiliki klaim kecelakaan kerja tertinggi di Bali, termasuk menggunakan fasilitas pusat layanan kecelakaan kerja di rumah sakit kerja sama.

BPJS Ketenagakerjaan Bali,

Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) mencatat sekitar 120 kasus kecelakaan kerja terjadi di Bali selama tahun 2018, baik kecelakaan fatal atau pulih melalui perawatan.

Menurut dia, kecelakaan kerja tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 seiring meningkatnya kepedulian perusahaan terhadap keselamatan tenaga kerjanya. “Pelatihan sangat tepat untuk memberikan bekal pengetahuan K3 bagi semua pekerja, terutama bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan proses yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” ucapnya. (ant)

ANTARA
KANTOR BERITA INDONESIA

81

13 Desember 1937 - 13 Desember 2018



DIRGAHAYU KE-81 LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN) **ANTARA**

(1937-2018)

Kamis, 13 Desember 2018



Didukung oleh :

